

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pada tanggal 27 April 2020 presiden Joko Widodo menetapkan 62 kabupaten dari beberapa provinsi di Indonesia sebagai daerah tertinggal periode 2020-2024, keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.63 tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal. Daerah tertinggal merupakan daerah yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional (Perpres Nomor 63 Tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2020-2024). Menurut Bappenas, daerah tertinggal ditandai dengan rendahnya aksesibilitas pelayanan sarana dan prasarana ekonomi dan sosial serta letak geografis yang relatif terpencil atau wilayah yang miskin sumber daya alam atau rawan bencana. Suatu daerah dapat dikatakan sebagai daerah tertinggal bila memiliki 6 kriteria yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2016 pasal 2 ayat 1, yaitu: (a) perekonomian masyarakat; (b) sumber daya manusia; (c) sarana dan prasarana; (d) kemampuan keuangan daerah; (e) aksesibilitas; dan (f) karakteristik daerah.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2016 pasal 3 pada kriteria poin a, yaitu perekonomian masyarakat memiliki 2 indikator pengukuran, yakni persentase penduduk miskin dan pengeluaran konsumsi perkapita. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pengeluaran konsumsi perkapita merupakan salah satu pengukuran untuk

mengetahui jumlah penduduk miskin, di mana hal tersebut tertulis dalam definisi penduduk miskin adalah penduduk yang pengeluarannya baik konsumsi maupun non-konsumsi berada di bawah garis kemiskinan. Hal tersebut menandakan bahwa daerah tertinggal masih erat kaitannya dengan isu masalah kemiskinan.

Kemiskinan sendiri merupakan salah satu masalah yang krusial dan bersifat multidimensional, hal tersebut menyebabkan kemiskinan masih menjadi prioritas dalam pembangunan. Pemerintah menyadari bahwa pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan masyarakat adil dan sejahtera. Tujuan pembangunan nasional ini juga tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, di mana tujuan pembangunan nasional tidak hanya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga berusaha untuk mengurangi kesenjangan pendapatan di masyarakat.

Menurut Lincoln (2010: 282) pertumbuhan ekonomi hanya menggambarkan nilai secara agregat bukan secara parsial, di mana negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi menunjukkan adanya distribusi pendapatan antara kelompok kaya dan kelompok miskin yang semakin tidak merata sehingga apa yang disebut dengan proses penetesan ke bawah (*trickle down effect*) dari manfaat pertumbuhan ekonomi tidak terjadi bagi orang miskin. Namun di sisi lain adapula pendapat yang mengatakan jika pertumbuhan ekonomi diyakini dapat menurunkan jumlah kemiskinan. Hal tersebut bisa terjadi jika pertumbuhan ekonomi diikuti dengan terciptanya perluasan kesempatan kerja. Menurut Tambunan (2015) pertumbuhan ekonomi tanpa diikuti dengan penambahan kesempatan kerja mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan (*ceteris paribus*),

yang kemudian hal tersebut menciptakan suatu kondisi di mana peningkatan pertumbuhan ekonomi diikuti dengan peningkatan kemiskinan. Maka dapat disimpulkan jika tujuan dari pembangunan masih erat kaitannya dengan usaha mengurangi angka kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pendapatan antara kelompok kaya dan kelompok miskin.

Berikut daftar provinsi yang masuk ke dalam kategori daerah tertinggal beserta jumlah penduduk miskinnya, yaitu:

Tabel 1.1 Daftar Provinsi Kategori Daerah Tertinggal Tahun 2020

No.	Provinsi	Kabupaten tertinggal	Jumlah Penduduk Miskin	Poverty Rate (%)
1	Sumatera Utara	4	1.356.720	9,14
2	Nusa Tenggara Timur	13	1.153.760	21,21
3	Sumatera Selatan	1	1.119.650	12,98
4	Lampung	1	1.091.140	12,76
5	Papua	22	912.230	26,80
6	Nusa Tenggara Barat	1	746.040	14,23
7	Sulawesi Tengah	3	403.740	13,06
8	Sumatera Barat	1	364.790	6,56
9	Maluku	6	322.400	17,99
10	Papua Barat	8	215.220	21,70
11	Maluku Utara	2	87.520	6,97

Sumber: Perpres No 63 tahun 2020 dan Bps Indonesia

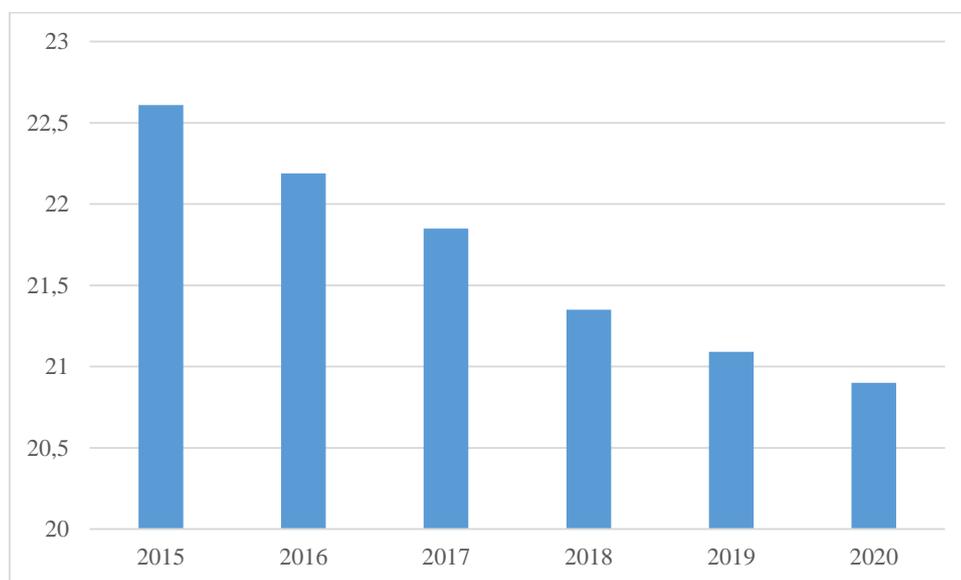
Dari 11 Provinsi yang termasuk kategori daerah tertinggal terdapat tiga provinsi dengan jumlah penduduk miskin paling banyak, pertama Provinsi Sumatera Utara yang ditandai dengan masuknya empat kabupaten sebagai kabupaten tertinggal dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 1.356.720 jiwa, kedua Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan masuknya 13 kabupaten sebagai kabupaten tertinggal dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 1.153.760 jiwa,

ketiga Provinsi Sumatera Selatan dengan total terdapat satu kabupaten tertinggal dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 1.119.650 jiwa.

Dari 11 provinsi tersebut, Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi kedua dengan jumlah penduduk miskin tertinggi, dan provinsi kedua dengan banyak kabupaten yang termasuk kategori daerah tertinggal, dengan *poverty rate* tertinggi ketiga sebesar 21,21%, hal tersebut dikuatkan pula dengan terdapatnya 13 kabupaten yang masuk kedalam kategori daerah tertinggal untuk tahun 2020-2024. Angka tersebut menurun sebanyak 27,7% dari periode sebelumnya. Pada periode sebelumnya terdapat 18 kabupaten yang masuk ke dalam penetapan kategori daerah tertinggal tahun 2015-2019 menurut Perpres Nomor 131 Tahun 2015. Penurunan tersebut merupakan pencapaian yang cukup besar bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur, artinya terdapat lima dari 18 kabupaten kategori daerah tertinggal, yaitu Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Ende, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, dan Kabupaten Nagekeo sudah terbebas atau lepas dari status daerah tertinggal, sedangkan untuk 13 kabupaten lainnya masih masuk kedalam daftar kategori daerah tertinggal tahun 2020-2024.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur tercatat sebanyak 1.153.760 jiwa, hal tersebut menunjukkan jika jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,7% dari tahun sebelumnya, yaitu 1.146.320 jiwa. Menurut catatan dari CNN terdapat lima kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang masuk sebagai kabupaten prioritas dalam penanganan kemiskinan ekstrem di Indonesia, hal tersebut ditandai dengan masuknya jumlah penduduk miskin

Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi ketiga dengan jumlah penduduk miskin ekstrem terbesar di Indonesia setelah Provinsi Papua dan Papua Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur menyumbang 10,63% penduduk miskin ekstrem dari total penduduk Indonesia dan yang paling banyak terdapat di 5 kabupaten dengan status kemiskinan ekstrem, yaitu Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Rote Ndao, Sumba Tengah dan Manggarai Timur. Pemerintah Nusa Tenggara Timur bersama dengan sejumlah bupati dari kelima kabupaten dengan status kemiskinan ekstrem selalu berupaya merancang program-program dalam pengentasan kemiskinan, agar nantinya pada tahun 2024 diharapkan angka kemiskinan di Nusa Tenggara Timur bisa menurun. Berikut persentase penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat terlihat pada gambar 1.1.

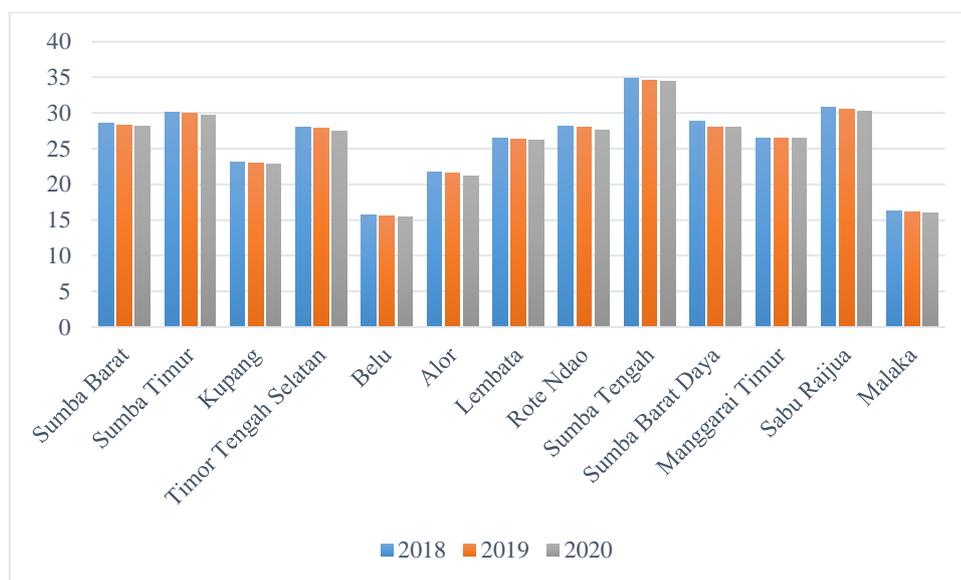


Gambar 1.1 Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2020 (%)

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur (diolah)

Pada gambar 1.1 angka kemiskinan yang paling tinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 22,61%. Namun dari tahun 2015 hingga tahun 2020 persentase kemiskinan

di Nusa Tenggara Timur mengalami penurunan walau penurunannya masih terbilang tipis, namun kendati demikian penurunan yang tipis tersebut merupakan salah satu pencapaian yang bermakna bagi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adanya penurunan tersebut dapat dikatakan bahwa penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur sedikit demi sedikit sudah mulai berkurang. Berikut persentase penduduk miskin di 13 kabupaten tertinggal di Nusa Tenggara Timur:



Gambar 1.2 Persentase Penduduk Miskin di 13 Kabupaten Tertinggal Provinsi NTT Tahun 2018-2020 (%)

Sumber: BPS Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2020 (diolah)

Pada gambar 1.2 persentase penduduk miskin dari tahun 2018-2020 masing-masing kabupaten tertinggal menunjukkan adanya penurunan walau penurunannya terbilang masih tipis. Dari ke 13 kabupaten tersebut, angka persentase penduduk miskin yang paling tinggi terdapat di kabupaten Sumba Tengah pada tahun 2020 sebanyak 34,5%, artinya dari total jumlah penduduk Sumba Tengah, sekitar 34,5% merupakan penduduk miskin dengan garis kemiskinan sebesar Rp307.853. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya jumlah anak yang melebihi pendapatan rumah

tangga sehingga kepala keluarga dan istri harus bekerja lebih keras dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Pendapatan dari hasil kerja tersebut difokuskan pada kebutuhan makanan, sedangkan untuk kebutuhan lainnya cenderung ditunda atau diabaikan (NTTonlinenow.com)

Hubungan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan memiliki 2 hubungan baik positif maupun negatif. Pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan meningkatnya kesempatan kerja, memiliki hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan, di mana kenaikan pertumbuhan ekonomi diikuti dengan menurunnya tingkat kemiskinan. Uraian tersebut dikuatkan pula dengan nilai data pertumbuhan ekonomi dan persentase penduduk miskin di provinsi Nusa Tenggara Timur yang terlihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2 Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di NTT

Keterangan	2017	2018	2019	2020
Pertumbuhan Ekonomi	5.11	5.11	5.24	-0.83
Kemiskinan	21.85	21.35	21.09	20.90

Sumber: BPS Nusa Tenggara Timur

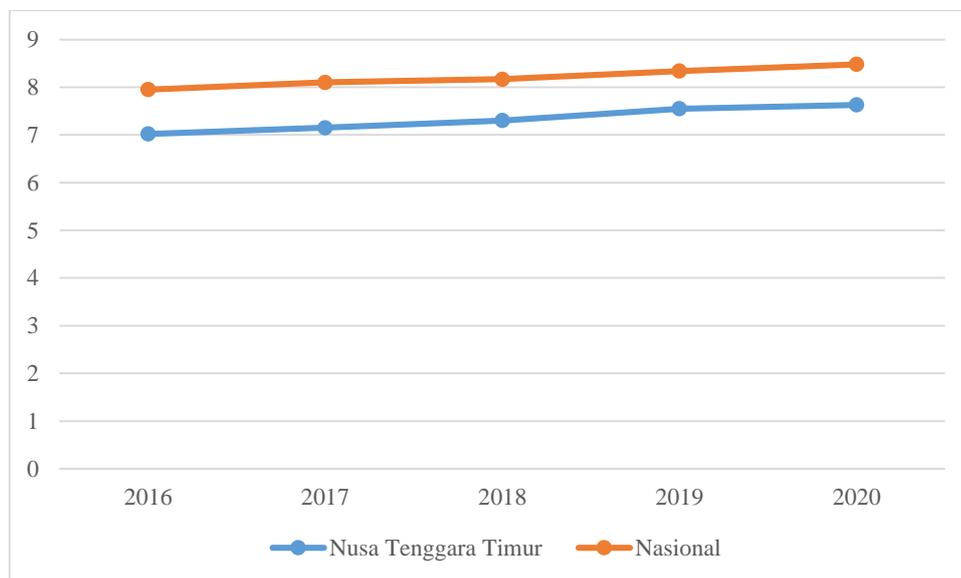
Pada tabel 1.2 menunjukkan jika pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017-2019 mengalami peningkatan, di mana pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 sebesar 5,11% meningkat menjadi 5,24% pada tahun 2019, peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti dengan menurunnya angka persentase penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada periode tahun yang sama, yaitu sebesar 21,85% pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 21,09% pada tahun 2019. Penurunan tersebut memang tidaklah besar, namun hal tersebut merupakan suatu pencapaian yang baik, sebab dengan demikian secara perlahan-lahan persentase penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur mulai berkurang,

artinya banyak penduduk Nusa Tenggara Timur yang pengeluaran perkapitanya sudah lebih dari angka garis kemiskinan, sedangkan pada tahun 2020, dikarenakan adanya pandemi covid menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Timur mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar -0,83%, hal tersebut terjadi karena adanya pengurangan produksi yang berdampak pada berkurangnya pendapatan di Nusa Tenggara Timur.

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk menghapus kebodohan dan kemiskinan. Kondisi pendidikan di Nusa Tenggara Timur dapat dikatakan masih sangat rendah, hal tersebut ditandai dengan banyaknya siswa SD, SMP di provinsi Nusa Tenggara Timur yang tidak melanjutkan pendidikannya. Kualitas pendidikan yang kurang baik menjadi penyebab rendahnya pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Beberapa penyebab tersebut antara lain (a) adanya kesenjangan antara pendidikan di daerah kota dan juga di daerah pedesaan yang ditandai dengan kurang memadainya sarana dan prasarana atau fasilitas di sekolah-sekolah antara sekolah di daerah perkotaan dan sekolah yang berada di pedesaan, (b) kualitas dan kuantitas guru yang masih kurang baik dan memadai serta gaji yang tidak layak menjadi permasalahan sedikitnya kuantitas guru, (c) kondisi bangunan yang buruk menjadi penyebab kegiatan proses belajar mengajar menjadi terkendala.

Dalam catatan kompas.com disebutkan bahwa terdapat 11% sekolah di Nusa Tenggara Timur dikatakan tidak layak atau rusak. Kerusakan sekolah tersebut ada yang sudah diperbaiki dan masih banyak pula yang dibiarkan kondisinya tetap seperti itu. Selain penyebab pendidikan yang telah disebutkan di atas, ketidakmampuan orang tua secara finansial untuk menyekolahkan anak-anaknya

dan juga pemikiran orang tua yang menilai bahwa pendidikan itu mahal menjadi salah satu penyebab tingkat pendidikan masyarakat di Nusa Tenggara Timur masih rendah, hal tersebut menyebabkan anak-anak terpaksa harus bekerja demi mendapatkan uang agar bisa mempertahankan keberlangsungan hidup, seperti untuk makan. Berikut perbandingan rata-rata lama sekolah tingkat nasional dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur terlihat pada gambar 1.3.



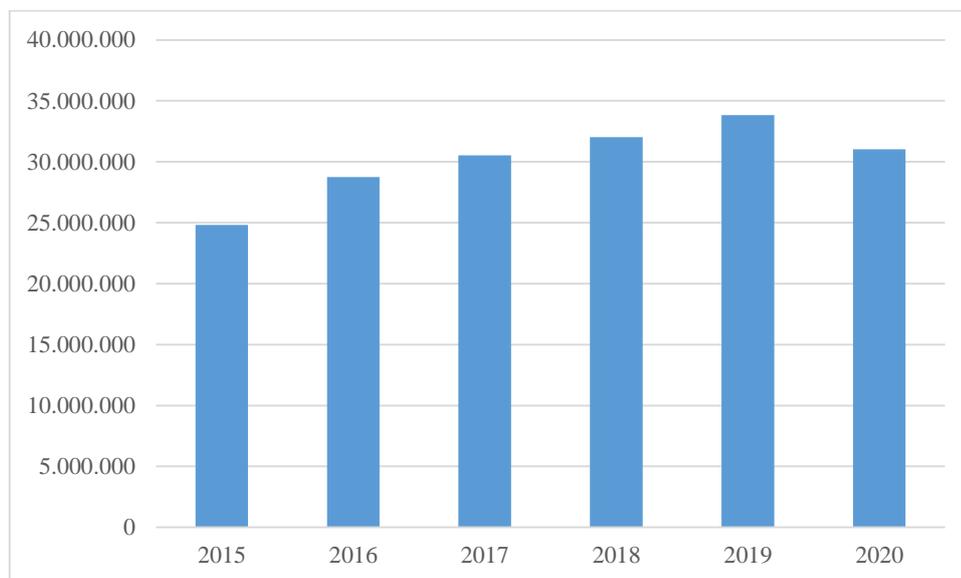
Gambar 1.3 Perbandingan RLS Tingkat Nasional dengan Provinsi NTT Tahun 2016-2020 (tahun)

Sumber: BPS Indonesia dan Nusa Tenggara Timur

Pada gambar 1.3 di atas menunjukkan jika pada tahun 2020 RLS Nusa Tenggara Timur mencapai 7,63 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah tingkat nasional mencapai 8,48 tahun, hal tersebut menunjukkan jika rata-rata lama sekolah di Nusa Tenggara Timur berada di bawah rata-rata lama sekolah tingkat nasional. Namun melihat dari angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2016 hingga tahun 2020 terus menunjukkan peningkatan, di mana rata-rata lama sekolah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2016, yaitu 7,02 tahun

meningkat menjadi 7,63 tahun pada tahun 2020. Selain itu melihat data dari BPS pada tahun 2020, Provinsi Nusa Tenggara Timur juga merupakan Provinsi terendah ke 5 di Indonesia untuk rata-rata pendidikannya.

Pentingnya peran dan dukungan investasi terhadap keberlanjutan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Timur sangat disadari betul oleh pemerintah Nusa Tenggara Timur, sebab sejumlah proyek infrastruktur baik itu infrastruktur ekonomi, infrastruktur bidang sosial dan kehidupan masyarakat membutuhkan dukungan dana yang besar, salah satu sumber dana tersebut berasal dari investasi. Melihat dari lingkungan alamnya, Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi yang alamnya masih sangat asri, masih banyak potensi-potensi alam yang bisa dijadikan tempat pariwisata. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah Nusa Tenggara Timur bisa mengupayakan adanya investasi untuk mengurangi kemiskinan. Investasi tersebut bisa digunakan untuk mengelola potensi-potensi alam agar nantinya bisa menjadi tempat pariwisata yang bisa meningkatkan pendapatan asli daerahnya, selain itu adanya investasi diharapkan bisa menciptakan *multiplier effect*, artinya dengan tingginya tingkat investasi bisa menghasilkan lapangan pekerjaan yang berdampak pada peningkatan partisipasi angkatan kerja dan juga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Nusa Tenggara Timur sehingga investasi diharapkan bisa menjadi salah satu indikator yang dapat menyeimbangkan pembangunan berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur. Berikut perkembangan investasi pembentukan modal tetap bruto di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu 2015-2020 terlihat pada gambar 1.4.



Gambar 1.4 Perkembangan Investasi PMTB Provinsi NTT Tahun 2015 – 2020 (Juta Rupiah)

Sumber: BPS Nusa Tenggara Timur 2015-2020

Pada gambar 1.4 kondisi perkembangan investasi pembentukan modal tetap bruto di Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa dari tahun 2015 hingga 2019 relatif mengalami peningkatan. Investasi tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar Rp33,8 Triliun dan yang terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar Rp24,8 Triliun. Hal tersebut menunjukkan jika kondisi investasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah meningkat, namun pada tahun 2020 investasi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp31,1 Triliun, hal tersebut terjadi karena adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan para investor menjadi khawatir untuk melakukan investasi di Indonesia khususnya di Nusa Tenggara Timur.

Dalam penanggulangan kemiskinan pemerintah Nusa Tenggara Timur tentu selalu berupaya untuk merancang program dalam pengentasan kemiskinan salah satunya, yaitu program bantuan sosial. Dalam pelaksanaan program tersebut tentu

memerlukan biaya atau dana bagi pelaksana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Anggaran yang berkaitan dengan program tersebut yaitu realisasi pengeluaran pemerintah menurut belanja bantuan sosial. Belanja bantuan sosial tersebut merupakan pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu upaya dalam mengurangi kemiskinan. Dengan adanya pemberian bantuan sosial tersebut diharapkan bisa membantu masyarakat atau penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Dalam setiap tahunnya anggaran belanja bantuan sosial di Nusa Tenggara Timur tentu tidak selalu sama, namun dari tahun 2017 – 2020, anggaran belanja bantuan sosial tersebut mengalami peningkatan. Berikut realisasi pengeluaran pemerintah menurut belanja bantuan sosial tahun 2017-2020 terlihat pada tabel 1.3.

Tabel 1.3 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Menurut Belanja Bantuan Sosial Tahun 2017-2020 (Ribu Rupiah)

Periode	Realisasi	Pertumbuhan (%)	Tk.Kemiskinan (%)
2017	54.649.931	91,45	21,85
2018	96.140.546	75,92	21,35
2019	114.552.856	19,15	21,09
2020	148.350.703	29,50	20,90

Sumber: BPS Nusa Tenggara Timur (2017-2020)

Pada tabel 1.3 realisasi pengeluaran pemerintah menurut belanja bantuan sosial dari tahun 2017 – 2020 pengeluarannya mengalami kenaikan, dari realisasi pengeluaran pemerintah untuk belanja bantuan sosial tersebut diikuti dengan menurunnya angka persentase penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur sebesar 21,85% pada tahun 2017 menjadi 20,90% pada tahun 2020.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendidikan, investasi dan belanja bantuan sosial terhadap tingkat kemiskinan di 13 kabupaten tertinggal Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk periode tahun 2015 - 2020. Oleh karena itu penulis memilih judul “**Analisis Determinan Tingkat Kemiskinan di 13 Kabupaten Tertinggal Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2020**”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil uraian yang telah disampaikan pada latar belakang, tentunya setiap daerah pasti memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan yang berbeda-beda maka penelitian ini bertujuan untuk mencari bukti empiris mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang ada dalam penelitian ini sehingga nanti dapat digunakan sebagai dasar kebijakan bagi 13 kabupaten tertinggal Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mengatasi permasalahan kemiskinan . Oleh karena itu, identifikasi masalah dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendidikan, investasi dan belanja bantuan sosial secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di 13 Kabupaten tertinggal Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2015-2020?
2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendidikan, investasi dan belanja bantuan sosial secara bersama terhadap tingkat kemiskinan di 13 Kabupaten tertinggal Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2015-2020?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas maka tujuan yang dicapai penulis dari pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendidikan, investasi dan belanja bantuan sosial secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di 13 Kabupaten tertinggal Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2015-2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendidikan, investasi dan belanja bantuan sosial secara bersama terhadap tingkat kemiskinan di 13 Kabupaten tertinggal Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2015-2020.

1.4. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak, adapun kegunaan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi media bagi peneliti untuk dapat menambah ilmu dan meningkatkan kemampuan dalam menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada salah satunya mengenai masalah kemiskinan, dan juga bisa mengimplementasikan ilmu yang didapat semasa kuliah.
2. Bagi pemerintah atau instansi pemangku kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadikan penelitian ini sebagai tolak ukur untuk terus berbenah agar masalah kemiskinan secepatnya bisa teratasi dengan baik, selain itu diharapkan pula untuk dijadikan bahan atau dasar dalam membuat keputusan

atau kebijakan dalam menangani permasalahan kemiskinan di Nusa Tenggara Timur khususnya di 13 kabupaten yang masuk kedalam kategori tertinggal.

3. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu bahan untuk referensi guna penelitian selanjutnya.

1.5. Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Indonesia, di mana penulis melakukan penelitian dengan menggunakan data sekunder yang diakses melalui *website* resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.5.2. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan sejak bulan September 2021 hingga Juni 2022, diawali dengan pengajuan SK pembimbing skripsi kepada pihak Program Studi Ekonomi Pembangunan dan diakhiri dengan sidang komprehensif. Berikut jadwal penelitian dapat terlihat pada tabel 1.4.

